

ASEAN sebagai Lingkaran Konsentris Pertama Indonesia

Muhammad Rizky Andis Rafaldhanis
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jayabaya
Email: andis.rafaldhanis@gmail.com

Abstrak

Harus disadari bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri RI ada satu konsep yang sering mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut, konsep ini dinamakan Lingkaran Konsentris. Konsep ini telah menjadi panduan bagaimana Indonesia melakukan kerjasama regional serta memudahkan seorang pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan wilayah mana yang dianggap lebih penting. Wilayah yang paling penting adalah wilayah yang paling dekat dengan Indonesia yaitu wilayah Asia Tenggara atau lebih luasnya, Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik. ASEAN merupakan organisasi yang paling berpengaruh di wilayah ini sehingga Indonesia harus menjadikan ASEAN prioritas utama dalam melaksanakan kebijakan luar negeri RI. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah di kawasan tersebut seperti Isu Laut China Selatan dan Krisis di Myanmar. Dengan Keketuaan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 mendatang, Indonesia harus segera memimpin ASEAN dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kedua isu tersebut apalagi jika Indonesia bercita-cita menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Pertumbuhan (*growth*) tidak dapat dicapai jika rakyat tidak merasa aman maka dari itu keamanan (*security*) merupakan prioritas utama yang pertama kali harus dicapai. Keamanan juga merupakan kunci dari stabilitas regional dan menjadi syarat demokrasi bisa berlangsung tanpa hambatan. Jika keamanan regional dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dapat dicapai, maka kesejahteraan bersama baru dapat diraih.

Kata Kunci: Lingkaran Konsentris, ASEAN, keamanan regional, Isu Laut China Selatan, Krisis di Myanmar

Pendahuluan

Dalam upaya mencapai kepentingan nasional setiap negara harus memanfaatkan seluruh potensinya dengan memahami letak dan kondisi geografis negara mereka. Salah satu potensi geostrategi Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia yang strategis. Indonesia terletak di dua benua dan dikelilingi oleh lautan, kondisi ini memberikan *advantage* bagi Indonesia dimana jika dimanfaatkan dengan benar maka Indonesia dapat menguasai perdagangan laut yang berlayar melalui perairan RI namun kondisi *archipelagic state* Indonesia juga membawa beberapa *disadvantage* jika tidak diurus dengan benar. Luasnya wilayah Indonesia mengakibatkan *vulnerability* yang besar dimana musuh ataupun pemberontakan dapat bergerak bebas jika Indonesia tidak memberikan upaya yang lebih besar dalam mempertahankan ketahanan nasional RI. Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas

menggagas serta mengembangkan konsep *Concentric Circle* dalam melakukan penyusunan prioritas praktek politik luar negeri RI agar dapat mengelola dan menyeimbangkan seberapa penting sebuah kebijakan luar negeri harus dilaksanakan agar pembangunan RI dapat berlangsung secara optimal. Konsep ini memudahkan seorang pembuat kebijakan dalam menjalankan kebijakan luar negeri RI dengan melihat kawasan mana yang memberikan posisi paling menguntungkan untuk Indonesia. Konsep ini telah menjadi panduan bagaimana Indonesia melakukan kerjasama regional dimana lingkaran konsentris ini dibagi menjadi tiga seri lingkaran: 1. ASEAN, 2. ASEAN + 3 (Jepang, China dan Korea Selatan), dan 3. *Like-minded Developing Countries*. Lingkaran Konsentris (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Lingkaran konsentris merupakan alat bagi Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional, karena dengan konsep lingkaran konsentris ini Indonesia dapat memutuskan bidang mana yang menjadi prioritas Indonesia (Irhamna, 2020). Dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri RI, stabilitas politik dan keamanan regional merupakan prioritas utama yang harus diciptakan agar membawa pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi RI.

ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama RI hingga prioritasnya sangat tinggi. ASEAN penting dalam mempertahankan keutuhan RI dimana dengan menjaga keamanan regional maka ketahanan wilayah RI dapat tercapai. ASEAN merupakan pusat pertumbuhan dunia, stabilitas regional dapat dicapai tidak hanya lewat keamanan militer tetapi dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN lewat kerjasama seperti perdagangan untuk menjaga ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan pangan. Besarnya intensitas kerjasama antara negara anggota ASEAN bukan berarti kawasan Asia Tenggara itu bebas dari konflik, isu Laut China Selatan dan Krisis Myanmar terus menjadi penyakit yang selalu memberi tantangan terhadap seberapa kuat integritas ASEAN. Maka dari itu, prioritas kebijakan luar negeri RI seharusnya diarahkan sepenuh-sepenuhnya untuk mempertahankan ASEAN sebagai bentuk *layered defense* ketahanan nasional dimana ASEAN merupakan zona penyangga antara Indonesia, RRT serta bangsa Barat.

AOIP dan RCEP sebagai Perluasan Lingkaran Konsentris Pertama Indonesia

Indonesia harus meluaskan zona lingkaran konsentris pertama Indonesia untuk mencakup Asia-Pasifik, serta Timur Tengah sebagai lingkaran konsentris kedua, dan Eropa sebagai lingkaran konsentris terluar karena dengan kedatangan waktu jabatan Indonesia sebagai ketua ASEAN maka *outlook* ASEAN pun akan berubah. Pada Juni 2019, ASEAN mengeluarkan pernyataan mengenai kepentingan kawasan Indo-Pasifik dalam dokumen AOIP (*ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific*), dokumen tersebut menyatakan pentingnya kerjasama Indo-Pasifik dan menjadikan pernyataan ini sebagai panduan sentral ASEAN dalam menjalankan kerjasamanya dengan kawasan Indo-Pasifik. Ada empat klaster prioritas kerjasama yaitu

- (1) Ekonomi,
- (2) Konektivitas,
- (3) SDG (*Sustainable Development Goals*),
- (4) Maritim (ASEAN, 2019).

AOIP memiliki satu tujuan yaitu untuk mempromosikan pertumbuhan (*growth*) dan

kerjasama (*prosperity*). AOIP sangat menguntungkan posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN salah satunya adalah mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim di Indo-Pasifik. Tantangan Geopolitik yang sering dihadapi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik berputar dalam isu-isu maritim seperti persengketaan wilayah maritim yang belum terselesaikan. Untuk menghindari konflik terbuka, maka perlu adanya pencegahan yang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara lebih terarah, damai dan menyeluruh. Selain masalah persengketaan wilayah, masalah ekologis seperti eksploitasi sumber daya maritim yang berlebihan serta polusi pencemaran air laut juga semakin menjadi masalah utama. AOIP hadir untuk mempromosikan kerjasama maritim kerjasama untuk mengatasi polusi laut, kenaikan permukaan laut, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut serta keanekaragaman hayati. Kerjasama antara negara-negara Indo-Pasifik dalam mengatasi masalah iklim sangat bermanfaat bagi Indonesia yang merasakan dampak langsung dari kenaikan air laut sebagai salah satu efek perubahan iklim global.

Perjanjian RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*) mulai berlaku pada 1 Januari 2022. RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama di antara ekonomi terbesar di Asia, termasuk China, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan merupakan blok perdagangan terbesar dalam sejarah. RCEP bertujuan untuk menarik pusat ekonomi dari Amerika kembali ke Asia sehingga memperkuat peran dominan China di kawasan Asia-Pasifik. Perjanjian ini kembali memberi dilema bagi negara-negara di Asia Tenggara yang seiring waktu akan semakin masuk ke dalam orbit ekonomi dan politik China dengan berkurangnya peran Amerika Serikat sebagai kekuatan yang satu-satunya dapat menyeimbangi RRC di Asia-Pasifik.

Namun, apakah dominasi RRC dapat dianggap sebagai kerugian jika keuntungan yang dapat diraih akan melebihi kerugian yang dihasilkan? Sejak perjanjian Bretton Woods 1944, dollar AS telah menggantikan emas sebagai alat tukar dunia dan apa saja keuntungan yang diperoleh Indonesia semasa hegemoni AS? Pemerintah AS dapat mencetak dollar kapan saja untuk memenuhi transaksi luar negerinya sehingga sistem moneter internasional sangat tergantung dengan kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Tidak ada salahnya jika hegemoni AS digantikan dengan hegemoni RRC jika mata uang Rupiah tidak dipatok oleh Yuan China. Dengan terlaksananya RCEP maka interdependensi ekonomi antara negara Asia-Pasifik dapat lebih meningkat sehingga memunculkan perdamaian yang lebih stabil di kawasan Asia-Pasifik. Perjanjian RCEP telah memenuhi kriteria tujuan luar negeri RI yaitu mengamankan kepentingan ekonomi RI serta menjaga keamanan regional RI.

Keketuaan Indonesia di ASEAN: *Epicentrum of Growth*?

Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun 2023, namun apa artinya untuk ASEAN? Perjanjian RCEP dan Pernyataan AOIP dapat menjadi batu loncatan Indonesia untuk meluaskan fokusnya keluar dari kawasan Asia Tenggara. Pusat perdagangan dunia mulai kembali beralih ke Asia dan momentum ini dapat digunakan negara-negara Asia untuk membangun pertumbuhan negaranya lewat pembangunan dan perdagangan dimana ASEAN akan menjadi *episentrum* atau pusat dari pertumbuhan ini dimana Keketuaan Indonesia akan menjadikan *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* (Sekretariat Kabinet

RI, 2022). Proses perdagangan saat ini telah terintegrasi oleh teknologi sehingga digitalisasi ekonomi akan menjadi prioritas Indonesia dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 nanti (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022). Di Indonesia sendiri, ekonomi digital dapat memperkuat ketahanan nasional yang mendukung kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dengan teknologi yang berbasis Internet maka pergerakan komunikasi, transaksi keuangan, dan pertukaran barang dan jasa dapat terlaksana dengan waktu yang cepat (Idat, 2019, 9). Namun, salah satu hambatan dari pengimplementasian digitalisasi ekonomi adalah masalah regulasi dan standardisasi (PSSAT UGM, 2020). Maka dari itu salah satu hal yang dapat diharapkan dari Keketuaan Indonesia di ASEAN nanti adalah perancangan perjanjian regulasi dan standarisasi ekosistem ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Banyak isu-isu yang akan menjadi tantangan bagi Keketuaan Indonesia nanti seperti klaim teritorial dan batas maritim yang belum terselesaikan seperti di Laut China Selatan dan militerisasi yang terjadi sebagai dampak krisis tersebut, Krisis Myanmar, Persaingan AS-RRC, Memanasnya hubungan *Cross-Strait* antara RRC dan Taiwan, Konflik Ukraina dan dampaknya terhadap *supply chain*, pemulihan ekonomi Pasca-COVID-19, serta munculnya blok baru QUAD-AUKUS. Semua masalah ini berkaitan dengan keamanan regional dan berdampak langsung terhadap ekonomi RI.

Krisis Myanmar

Keketuaan Indonesia akan berhadapan langsung dengan upaya penyelesaian Krisis di Myanmar. Protes terhadap Junta Militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing telah berubah menjadi perang sipil antara Tatmadaw (Militer) dan *People's Defence Force* dibawah perintah *National Unity Government* (NUG). Organisasi Etnik Bersenjata seperti KIO (*Kachin Independence Organization*), KNU (*Karen National Union*), CNF (*Chin National Front*), PSLF (*Palaung State Liberation Front*), dan ULA (*United League of Arakan*) bersekutu dengan NUG yang menandakan awal sebuah pergerakan yang terpadu melawan rezim militer. Namun konflik terbuka memantik terjadinya konflik etnis yang baru. Rezim militer menggunakan taktik pembumihangusan pos-pos pertahanan yang tidak dapat dipertahankan lagi dan pembakaran desa-desa yang dianggap simpati dengan oposisi. Sebelumnya, para pemimpin ASEAN telah setuju atas konsensus yang dikenal sebagai *five-point consensus* dalam upaya menekan kekerasan di Myanmar. *Five-point consensus* ini gagal dalam pengimplementasiannya karena beberapa pernyataan dalam dokumen tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan urusan dalam negeri negara anggota dan bertentangan dengan prinsip dasar dan ketentuan dalam Piagam ASEAN yang mengutamakan prinsip *Non-Interference*. Oleh karena itu, Myanmar dengan tegas menolak keputusan yang dibuat oleh ASEAN (MOFA, 2022). NUG setuju bahwa kurangnya kemajuan dalam implementasi 5PC mengharuskan opsi lain harus dieksplorasi, sekarang tergantung pada Indonesia sebagai Keketuaan yang baru untuk melakukan pendekatan ASEAN yang baru dalam menangani Krisis di Myanmar.

Tidak sedikit kritik dilontarkan ke arah ASEAN dikarenakan gagalnya 5PC, namun ASEAN merupakan satu-satunya organisasi berusaha menyelesaikan konflik di Myanmar

bahkan tidak ada konsultasi internasional oleh PBB untuk diadakannya pendekatan terkoordinasi (yang melibatkan anggota ASEAN). SAC (*State Administration Council*) telah menolak keputusan ASEAN, sedangkan NUG telah menawarkan untuk bekerja sama dengan ASEAN. ASEAN mengeluarkan Peninjauan dan Keputusan Para Pemimpin ASEAN tentang Implementasi 5PC yang menunjukkan komitmen lebih besar dalam penyelesaian konflik di Myanmar namun agar terciptanya kemajuan yang nyata maka Indonesia sebagai ketua ASEAN berikutnya harus dapat menindaklanjuti dengan cepat dan teratur. (Thuzar & Seah, 2022).

5PC bukanlah obat, salah jika ASEAN menggunakan 5PC sebagai solusi tunggal untuk memulihkan Myanmar. 5PC bukanlah solusi, ASEAN tidak dapat mengandalkan konsensus untuk mengakhiri konflik. ASEAN harus memberikan kewenangan dan perhatian penuh untuk membatasi bencana kemanusiaan yang terjadi sebagai akibat dari kudeta dan perang sipil. Prinsip *Non-Interference* tidak harus tetapi ASEAN harus memberikan rakyat Myanmar sebuah jalan menuju *Self-Determination* yang prosesnya diawasi sepenuhnya oleh ASEAN. Pemilihan umum diperkirakan akan diadakan di Myanmar sekitar tahun 2023 antara 1 Februari dan 1 Agustus 2023, Rezim militer akan menggunakan pemilu ini sebagai ajang mencari legitimasi sehingga ASEAN dan organisasi internasional lainnya harus mengawasi proses terjadinya pemilu tersebut agar berlangsung secara adil dan demokratis.

Sengketa di Laut Cina Selatan

Dalam beberapa tahun terakhir, citra satelit telah menunjukkan peningkatan upaya China untuk merebut kembali kekuasaannya di Laut Cina Selatan dengan secara fisik meningkatkan ukuran pulau atau membuat pulau baru sekaligus. Selain itu China telah membangun pelabuhan, instalasi militer, dan lapangan terbang serta mengerahkan jet tempur, rudal jelajah, dan sistem radar (Center for Preventive Action, 2022). Untuk melindungi kepentingan politik, keamanan, dan ekonominya di kawasan LCS, Amerika Serikat telah menentang klaim teritorial China dengan tegas serta memperkuat dukungan untuk negara-negara mitra AS Asia Tenggara.

Sikap Indonesia selama ini masih berpegang teguh atas ZEE dan Keputusan UN sehingga Indonesia memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan seringkali menjadi mediator antara negara-negara *claimants*. ASEAN masih terus mengusahakan penyelesaian rancangan CoC atau *Code of Conduct* yang merupakan lanjutan dari DoC di 2011, usaha ini masih mengalami hambatan-hambatan sampai saat ini. Code of Conduct (COC) dimaksudkan untuk mengurangi risiko konflik di Laut Cina Selatan antara China dan empat negara anggota ASEAN: Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Amerika Serikat, yang mempertahankan kepentingan penting dalam memastikan kebebasan navigasi (*Freedom of Navigation*), telah menyatakan dukungan untuk pembentukan *Code of Conduct* yang mengikat dan tindakan pembangunan kepercayaan lainnya.

Trust Deficit

Proses diplomasi dan negosiasi dapat berlangsung jika semua pihak dapat mempercayai satu sama lain. Amerika Serikat juga telah meningkatkan aktivitas militer dan kehadiran

angkatan lautnya di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk operasi kebebasan navigasi (FONOP) pada Januari dan Maret 2018. Hasil dan proses diplomasi sangat tergantung dengan dua aktor penting: Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dukungan AS terhadap Taiwan meningkatkan persaingan AS-RRC namun setelah pertemuan G20 di Bali, Presiden AS Joe Biden mengatakan “tidak perlu ada Perang Dingin baru” antara AS dan China. Joe Biden melihat bahwa tidak ada upaya nyata oleh China untuk menginvasi Taiwan (Wilkie, 2022). Persaingan yang semakin memanas antara AS-RRC berarti bahwa campur tangan pihak luar dalam perancangan CoC juga akan meningkat namun usaha-usaha de-eskalasi selalu diupayakan.

Pada bulan Mei, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi tuan rumah pertemuan langsung pertama para pemimpin AS-ASEAN di Gedung Putih sejak pandemi dimulai. Pertemuan antara AS dengan ASEAN dapat memberikan dorongan untuk negosiasi CoC dengan China di Laut China Selatan. Amerika Serikat telah berkomitmen untuk memastikan keamanan maritim di kawasan dengan mengintensifkan kerja sama dengan ASEAN untuk mengatasi masalah seperti penangkapan ikan ilegal, kejahatan terorganisir transnasional, dan yang terpenting, *Freedom of Navigation* di Laut Cina Selatan (Darmawan, 2022).

Isu Laut China Selatan tidak dapat dipisahkan dari keinginan China untuk memperluas wilayahnya. Konflik ini berakar pada apa yang disebut klaim sembilan garis putus-putus (*Nine-dash lines*) China atas wilayah perairan LCS yang secara sepihak mengklaim sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Sama seperti bagaimana alasan politik menyebabkan Brexit, Laut Cina Selatan perselisihan itu memecah belah daripada mempersatukan ASEAN. Perselisihan antar anggota ASEAN dalam isu LCS dapat memecah belah ASEAN. Masalah inilah yang memudahkan China dalam memutuskan persatuan ASEAN. Cina tidak menginginkan organisasi regional yang solid dan kohesif seperti ASEAN dan telah bekerja keras untuk mencegah persatuan ASEAN (Rosiana, 2022).

Meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam isu Laut China Selatan, Indonesia tetap terlibat langsung atas kedaulatannya di laut Natuna, oleh karena itu Indonesia masih memiliki kepentingan keamanan di kawasan tersebut serta kepentingan lain meliputi integritas teritorial, stabilitas kawasan, dan ekonomi (Rosiana, 2022). Sembilan garis putus-putus RRC tumpang tindih dengan batas ZEE Indonesia, Indonesia juga memiliki posisi yang strategis dalam masalah LCS karena netralitasnya sehingga selalu dipilih sebagai mediator antara negara ASEAN dan RRC. Indonesia juga tidak melakukan penolakan terhadap pendekatan yang dilakukan RRC dalam mengimbangi kekuatan AS. Posisi yang unik ini harus dipertahankan dan juga dimanfaatkan secara bijaksana dimana Indonesia harus sebisa mungkin merangkul semua pihak yang bersengketa.

QUAD-AUKUS

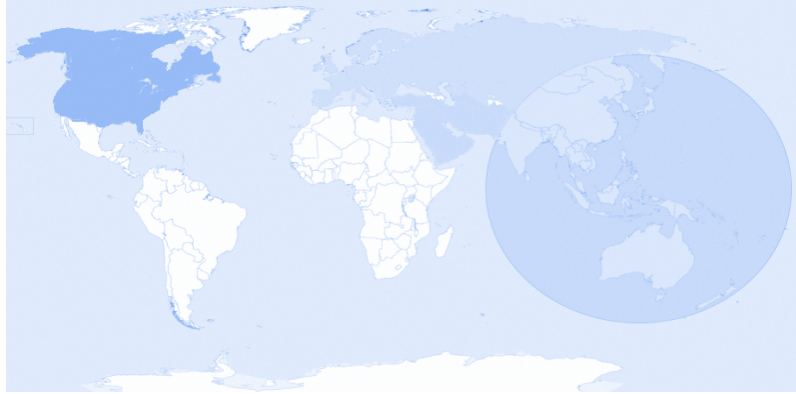
Amerika Serikat mendirikan pakta AUKUS antara Australia, Inggris Raya dan Amerika Serikat yang memudahkan Australia untuk mendapatkan kapal selam nuklir dan teknologi misil. Pakta ini juga memberikan Inggris kekuatan tambahan untuk melindungi negara-negara bekas jajahannya seperti Malaysia dan Singapura. Perjanjian ini mendapat kritikan

dari Prancis yang sebelumnya berencana untuk menjual kapal selamnya ke Australia. Kritik juga dilontarkan Selandia Baru kepada Australia karena dianggap telah melanggar peraturan bebas nuklir di laut Oceania. Tujuan dari pakta pertahanan ini juga mencakup pengembangan kemampuan digital dan *cyberwarfare*, *artificial intelligence*, dalam upaya menghadapi kebangkitan China di Indo-Pacific yang dianggap sebagai ancaman. Pada 23 September 2022, AS, Inggris, dan Australia merilis pernyataan bersama yang mengumumkan kemajuan menuju akuisisi kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia di tengah pembangunan militer China di sekitar Taiwan dan di Laut China Selatan. Akuisisi kapal selam ini juga termasuk senjata hipersonik, siber, peningkatan kemampuan perang elektronik, dan senjata bawah laut tambahan untuk memperkuat kemampuan militer Australia dalam menghadapi RRT.

QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*) merupakan dialog keamanan strategis antara Jepang, India, Australia, dan AS. Keempat negara setuju untuk menentang keras penggunaan kekuatan apapun oleh China, dan berjanji untuk bekerja sama dengan ASEAN dan Eropa untuk mencapai tujuan mereka. Keempat anggota Quad telah memainkan peran utama dalam mendefinisikan ulang "Asia-Pasifik" sebagai "Indo-Pasifik", untuk memperdalam hubungan trans-regional antara wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. QUAD berusaha menggambarkan dirinya secara lebih luas sebagai penopang keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Sentralitas ASEAN dalam Lingkaran Konsentris RI

Haruskah ASEAN menjadi organisasi yang lebih sentral seperti Uni Eropa atau NATO? Pada masa Orde Baru, Adam Malik menolak rencana untuk menjadikan ASEAN sebagai koalisi militer dan menegaskan bahwa ASEAN memiliki fungsi utama sebagai koalisi ekonomi. ASEAN adalah Organisasi Regional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di negara-negara Asia Tenggara, dan tidak pas jika digunakan untuk menggantikan PBB atau ditetapkan sebagai Uni Eropa-nya Asia Tenggara. ASEAN mendapatkan manfaat dari kompleksitas dan inklusivitas dari wilayah Asia Tenggara dan seharusnya tidak menjadi teater bagi AS dan China. Jawabannya adalah ASEAN tidak perlu menjadi NATO atau Uni Eropa-nya Asia Tenggara, yang dibutuhkan ASEAN adalah memperkuat persatuan antara negara-negara anggota ASEAN agar tidak menjadi pion AS dan China. Membatasi pengaruh AS dan China bukan berarti ASEAN harus berhenti menjalin diplomasi dengan kedua negara tersebut, ada baiknya memperluas prinsip bebas-aktif di ASEAN.



Gambar 1 : *New Concentric Circles of Indonesia: **First Circle** (Asia-Pacific +Indo-Pacific), **Second Circle** (Middle-East), **Third Circle** (Europe)*

Daripada mengubah sistem dan struktur ASEAN para pembuat kebijakan luar negeri RI lebih baik memperluas lingkup lingkaran konsentris pertama RI untuk mencakup Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik dengan ASEAN sebagai pusatnya. Lingkaran lainnya adalah Timur-Tengah dan Eropa sebagai lingkaran terluar. Keketuaan Indonesia di ASEAN nanti diharapkan membawa banyak perubahan dalam mengatasi dua isu utama, yaitu Konflik Myanmar dan Isu LCS. Dunia akan menyaksikan apakah ASEAN di bawah Indonesia dapat menebus kegagalan yang telah dialami akhir-akhir ini. Persatuan dan persaudaran ASEAN sebagai organisasi regional juga akan diuji dan jangan sampai Perselisihan AS-RRC menjadi perselisihan internal.

Kesimpulan

Penting bagi pemerintah Indonesia untuk sadar atas pentingnya ASEAN dalam pertahanan nasional RI. ASEAN bukan hanya koalisi ekonomi namun juga tameng untuk Indonesia dalam menghadapi lawan eksternal. Tali persahabatan antara negara-negara anggota perlu diikat lebih erat dan Indonesia harus menjadi sosok pemersatu ASEAN.

Masih banyak yang harus diselesaikan, mulai dari komitmen ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar sampai penyelesaian *Code of Conduct* sebagai salah satu solusi di Laut Cina Selatan. Walaupun banyak keraguan tetap ada satu hal yang pasti, Indonesia harus tetap memegang teguh terhadap prinsip “Bebas-Aktif” dalam menjalani jabatannya sebagai ketua ASEAN 2023 nanti dan semoga dapat memberikan pendekatan yang baru dalam menghadapi isu-isu tersebut. Dunia akan menyaksikan dan jika kita berhasil menjaga integritas ASEAN, maka status Indonesia sebagai *Regional Power* dan pemimpin Asia Tenggara niscaya akan terukir selamanya.

Daftar Referensi

ASEAN. (2019, 6 29). *ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC*. ASEAN. Retrieved November 28, 2022, from https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

- Center for Preventive Action. (2022, May 4). *Territorial Disputes in the South China Sea* | *Global Conflict Tracker*. Council on Foreign Relations. Retrieved November 29, 2022, from <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>
- Darmawan, A. R. (2022, June 8). The US-ASEAN summit and the South China Sea Code of Conduct. *Asia and the Pacific Policy Society*. <https://www.policyforum.net/the-us-asean-summit-and-the-south-china-sea-code-of-conduct/>
- Idat, G. G. (2019). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 1(38), 5-12. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_38_Juni_2019.pdf
- Irhamna, M. H. (2020, May 5). *Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. ResearchGate. Retrieved November 29, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/341190281_Lingkaran_Konsentris_Politik_Luar_Negeri_Republik_Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022, November 25). *Kewirausahaan Digital Jadi Kunci Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Subregional*. Kementerian Komunikasi dan Informatika - Berita Pemerintahan. Retrieved November 29, 2022, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/45997/kewirausahaan-digital-jadi-kunci-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-subregional/0/berita>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019, March 26). *Kerja Sama Regional* | *Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Kementerian Luar Negeri. Retrieved November 28, 2022, from <https://kemlu.go.id/portal/id/page/20/kerja-sama-regional>
- MOFA. (2022, November 12). MOFA Press Release: Myanmar rejects ASEAN Leaders' Review & Decision. *Myanmar International TV*. <https://www.myanmaritv.com/news/mofa-press-release-myanmar-rejects-asean-leaders%E2%80%99-review-decision>
- PSSAT UGM. (2020, December 4). *ASEAN as The New Kingdom of Digital Economy : Pertumbuhan Pesat Ekonomi Digital Asia Tenggara – Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada - Esai Akademik. Retrieved November 29, 2022, from <https://pssat.ugm.ac.id/id/asean-as-the-new-kingdom-of-digital-economy-pertumbuhan-pesat-ekonomi-digital-asia-tenggara/>
- Rosiana, Y. S. (2022). The South China Sea Dispute: Code of Conduct Implementation as the Dispute Settlement. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/884/788>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022, November 13). *Indonesia Terima Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Indonesia Terima Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja. Retrieved November 29, 2022, from <https://setkab.go.id/indonesia-terima-keketuaan-asean-2023-dari-kamboja/>
- Thuzar, M., & Seah, S. (2022, November 17). Reviewing the Review: ASEAN's Five-Point Consensus Implementation | FULCRUM. *Fulcrum - Analysis on Southeast Asia*. <https://fulcrum.sg/reviewing-the-review-aseans-five-point-consensus-implementation/>

Wilkie, C. (2022, November 14). Biden sees no need for 'new Cold War' with China after meeting with Xi Jinping. *CNBC*. <https://www.cnbc.com/2022/11/14/biden-sees-no-need-for-a-new-cold-war-with-china-after-three-hour-meeting-with-xi-jinping.html>